



LKjIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

TAHUN 2020

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



0763 - 33630



dpmptsptkmeranti@gmail.com

KATA PENGANTAR

Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja adanya Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2020 yang disampaikan kepada Bupati Kepulauan Meranti. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran dan realisasi anggaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Selatpanjang, Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



AFRIZAL DHARMA, SE
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19740401 199903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
1.3 Isu Strategis	13
1.4 Landasan Hukum	14
1.5 Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis Organisasi	16
2.2 Indikator Kinerja Utama DPMPTSPK	19
2.3 Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	24
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	25
3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	27
3.3.1 Meningkatkan Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti	27
3.3.2 Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja	37
3.4 Akuntabilitas Keuangan	46
BAB IV PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan Ruang Gaji (Per Desember 2020).....	7
Tabel 1. 2	Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan (Per Desember 2020).....	8
Tabel 1. 3	Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Formal (Per Desember 2020).....	9
Tabel 1. 4	Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perjenjangan (Per Desember 2020)	10
Tabel 1. 5	Saran dan prasarana kerja di DPMPTSPK.....	11
Tabel 2. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSPK	19
Tabel 2. 2	Indikator Kinerja Utama DPMPTSPK Tahun 2020.....	20
Tabel 2. 3	Perjanjian Kinerja DPMPTSPK Tahun 2020	21
Tabel 2. 4	Program dan Alokasi Dana DPMPTSPK Tahun 2020.....	21
Tabel 3. 1	Kode Warna Persentase Capaian Target Kinerja Instansi Pemerintah	24
Tabel 3. 2	Kode warna realisasi capaian kinerja di bawah 100%.....	25
Tabel 3. 3	Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2020	26
Tabel 3. 4	Analisis Pencapaian Meningkatnya Nilai Investasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	28
Tabel 3. 5	Program dan Kegiatan Yang Menunjang Sasaran 1	29
Tabel 3. 6	Capaian Program dan Kegiatan Sasaran 1	30
Tabel 3. 7	Capaian Kegiatan Tahun 2019-2020 Untuk Sasaran 1	31
Tabel 3. 8	Analisis Pencapaian Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	32
Tabel 3. 9	Analisis Pencapaian Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja.....	38
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSPK Kab. Kepulauan Meranti dengan Kementerian Ketenagakerjaan.....	40
Tabel 3.11	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	40
Tabel 3. 12	Program, Kegiatan di Umum Sekretariat.....	43
Tabel 3. 13	Capaian Program dan Kegiatan di Umum Sekretariat	44
Tabel 3. 14	Capaian Kegiatan Tahun 2019-2020 Kegiatan di Umum Sekretariat	45
Tabel 3. 15	Akuntabilitas Keuangan DPMPTSPK Tahun 2020.....	46
Tabel 3. 16	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020	48
Tabel 3.17	Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Tujuan DPMPTSPK Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020	48
Tabel 3. 18	Penyerapan Anggaran Pada Setiap Tujuan DPMPTSPK Kabupaten Kepulauan Meranti 2020.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DPMPTSPTK Kab. Kep. Meranti.....	6
Gambar 1. 2 Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan Ruang Gaji	7
Gambar 1. 3 Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan (Per Desember 2020).....	8
Gambar 1. 4 Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Formal	9
Gambar 1. 5 ASN Berdasarkan Diklat Struktural	10
Gambar 3. 1 Ruang Pelayanan di DPMPTSPTK Kabupaten.....	35

1.1 Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, **Pemerintah** Provinsi/**Kabupaten**/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Organisasi Perangkat Daerah**, dan unit kerja m

andiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang melaksanakan tugasnya di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik yaitu setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran 2018.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menyusun LKjIP Tahun 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisipertanggung jawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tahun berikutnya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Gambaran umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan isu strategis.

1.1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.

1.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Program serta Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;

c. UPT Latihan Kerja, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi DPMPSTPK Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilaksanakan oleh Kepala UPT Latihan Kerja, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

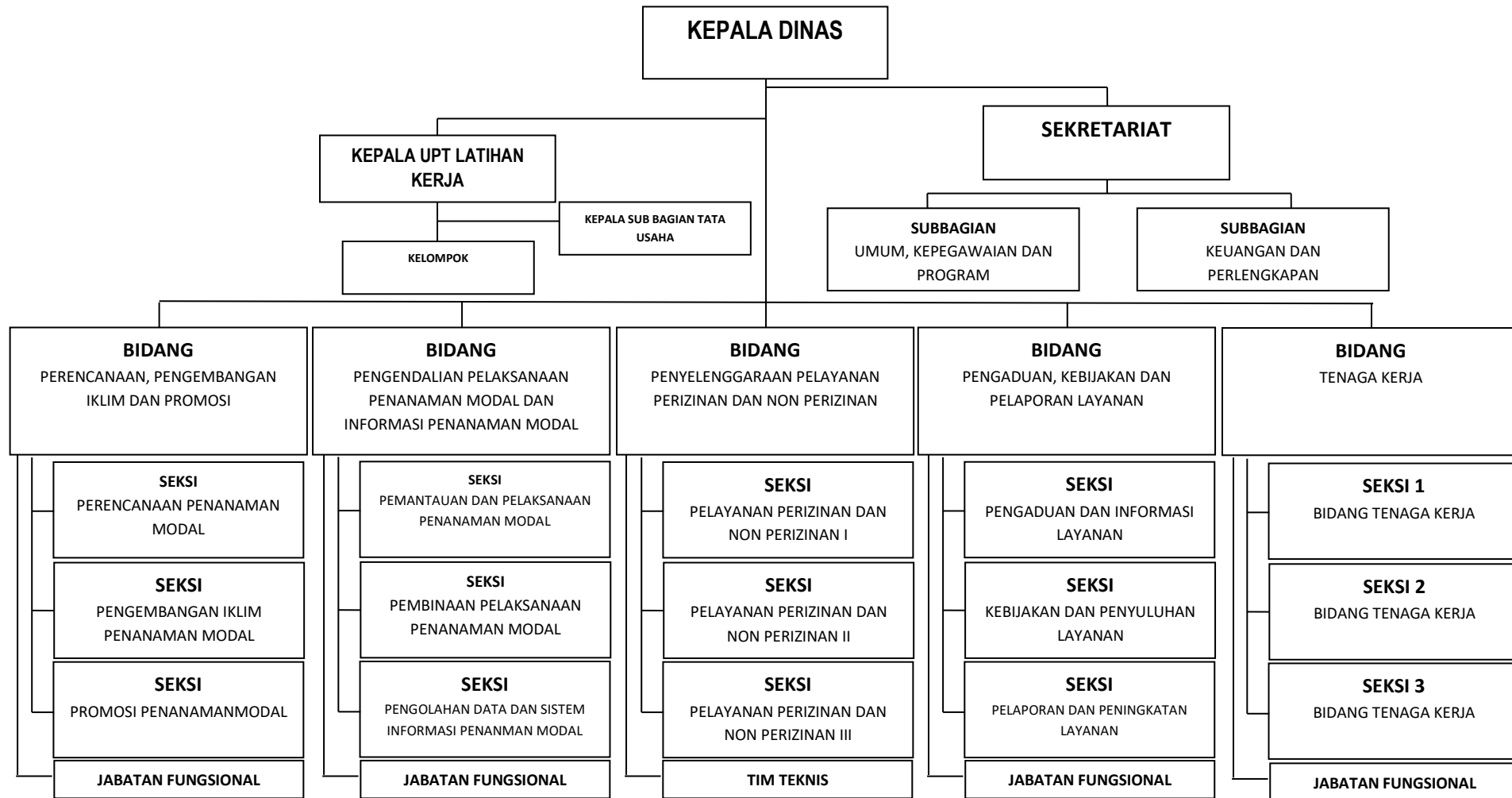
d. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas merencanakan, mengkaji, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengembangkan, fasilitasi pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal. Serta menyelenggarakan urusan pada Seksi Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal.

- e. Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal**, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Khususnya tugas-tugas yang terdapat pada Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, pada urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, kesehatan, Pendidikan, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Sosial dan Tenaga kerja, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Pariwisata, Perhubungan, Lingkungan hidup, Koperasi usaha kecil dan menengah, Kebudayaan, Kelautan dan perikanan, Penanaman Modal.
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. Serta menyelenggarakan urusan pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan serta Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- h. Bidang Tenaga Kerja**, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Penempatan Pelatihan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Produktifitas

Tenaga Kerja serta Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DPMPSTPK Kab. Kep. Meranti



1.1.3 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, didukung dengan 30 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan rincian sebagai berikut:

a. Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan Ruang Gaji.

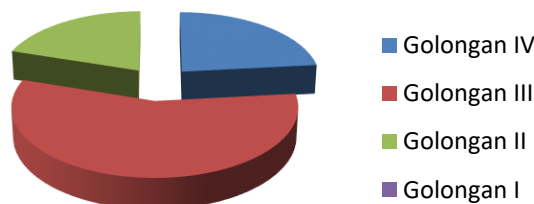
Berdasarkan data pada Tabel 1.1. diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 18 orang atau 60.00%, sedang golongan ruang gaji terkecil adalah golongan I yang berjumlah 0 orang atau 0.00%.

Tabel 1. 1 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan Ruang Gaji (Per Desember 2020)

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Golongan IV	7	23.33
2	Golongan III	18	60.00
3	Golongan II	0	0.00
4	Golongan I	0	0.00
JUMLAH		30	100.00

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

Secara sederhana kondisi Aparatur Sipil Negara menurut golongan ruang gaji dapat dilihat Gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1. 2 Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan Ruang Gaji

b. Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan/Eselonering.

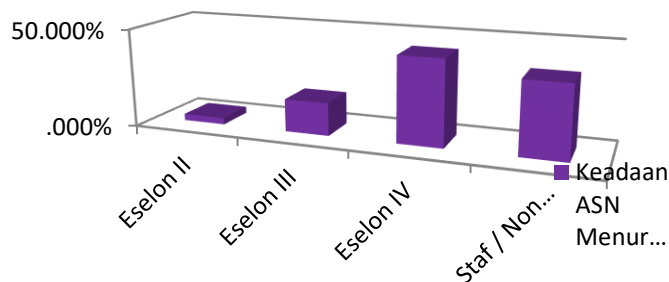
Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 30 orang, Berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam 4 (empat) kelompok sebagaimana data pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1. 2 Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan (Per Desember 2020)

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Eselon II	1	3.33
2	Eselon III	5	16.67
3	Eselon IV	13	43.33
4	Staf / Non Struktural	11	36.67
JUMLAH		30	100.00

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara DPMPTSPK menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 1. 3 Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan (Per Desember 2020)

c. Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Berdasarkan tingkat pendidikan formal aparatur sipil negara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, diuraikan ke dalam 7 (tujuh) tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini

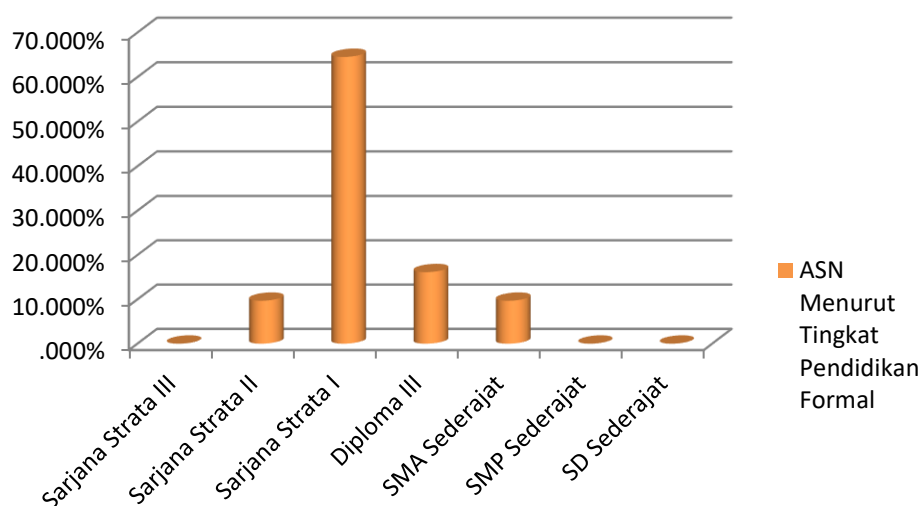
Tabel 1. 3 Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Formal (Per Desember 2020)

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Sarjana Strata III	0	0.00
2	Sarjana Strata II	3	9.68
3	Sarjana Strata I	20	64.52
4	Diploma III	5	16.13
5	SMA Sederajat	3	9.68
6	SMP Sederajat	0	0.00
7	SD Sederajat	0	0.00
JUMLAH		31	100.00

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan Tabel 1.3. diketahui bahwa tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S.1) yang berjumlah 20 orang atau 64.52%.

Secara sederhana gambaran ASN Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti menurut tingkat Pendidikan Formal dapat dilihat Gambar 1.4 berikut ini.



Gambar 1. 4 Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Formal

d. Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Penjurangan

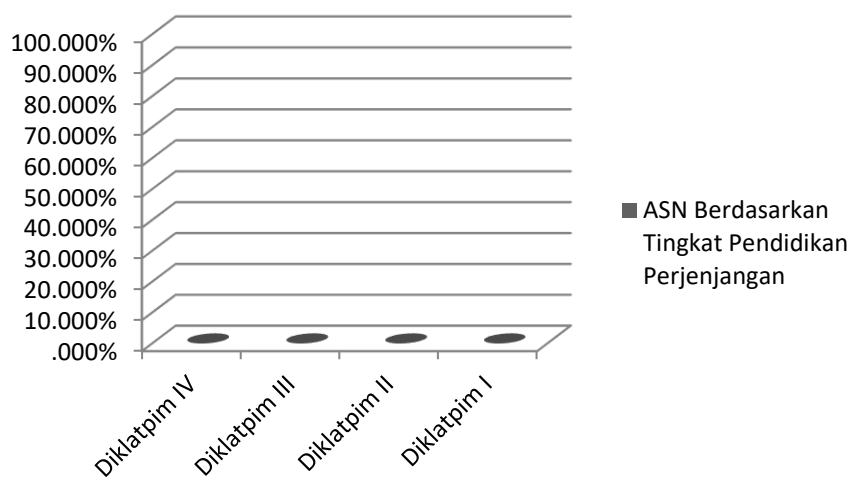
Berdasarkan tingkat pendidikan penjurangan aparatur sipil negara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkat pendidikan penjurangan dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1. 4 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjurangan (Per Desember 2020)

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Diklatpim IV	1	5.26
2	Diklatpim III	4	66.67
3	Diklatpim II	0	0.00
4	Diklatpim I	0	0.00
JUMLAH		5	71.93

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel 1.5 menggambarkan bahwa hanya 5 (Lima) orang ASN yang telah mengikuti pendidikan penjurangan yakni 4 (empat) orang Diklatpim III dari 19 (sembilan belas) dari jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang serta 1 (satu) orang Diklatpim IV dari jabatan Kasubbag dan Kepala Seksi



Gambar 1. 5 ASN Berdasarkan Diklat Struktural

Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terletak di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Johari Dagang. Untuk menunjang kinerja pelayanan ASN di lingkungan

Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, sarana dan prasarana kerja di sebar disekretariat dan bidang-bidang. Adapun kondisi keadaan sarana dan prasarana kerja tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5 Saran dan prasarana kerja di DPMPSTK

No	Klasifikasi Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda Empat	1	
2	Kendaraan Roda Dua	8	
3	Mesin Bor	2	
4	Mesin Kompresor	2	
5	Peralatan Las Listrik	1	
6	Gergaji Besi	2	
7	Topeng Las	2	
8	Kunci Inggris	1	
9	Mesin Penghitung Uang	2	
10	Filing Cabinet Besi	30	
11	Lemari Kayu	23	
12	Lemari Besi/Metal	5	
13	CCTV	1	
14	Papan Informasi	4	
15	Teralis	1	
16	Papan Visual/Papan Nama	1	
17	Papan Nama Instansi	1	
18	Papan Absen	1	
19	Alat Penghancur Kertas	3	
20	Meja Kerja Kayu	18	
21	Kursi Kerja	4	
22	Meja Kerja Kayu	5	
23	Kursi Kerja	5	
24	Tempat Tidur Besi	56	
25	Sofa	5	
26	Kursi Putar	5	
27	Kursi Biasa	47	
28	Meja Ketik	1	
30	Meja Rapat	1	

No	Klasifikasi Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
31	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	
32	Mesin Pemotong Rumput	1	
33	A.C. Split	22	
34	A.C. Standing Flour	2	
35	Portable Air Conditqs ioner (Alat Pendingin)	1	
36	Kipas Angin	12	
37	Lemari Es	7	
38	Kompur Gas (Alat Dapur)	1	
39	Rak Piring Alumunium	2	
40	Sound System	1	
41	Mesin Jahit	19	
42	Gordyin/Kray	57	
43	Dispenser	6	
44	Televisi	8	
45	Tiang Bendera	1	
46	Pelubang Kancing	2	
47	Mesin Bordir	3	
48	Meja Kerja Pejabat Eselon	27	
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon	21	
50	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	2	
51	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	5	
52	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	23	
53	Intercom Unit	1	
54	Uninterruptible Power Supply (UPS)	14	
55	Facsimile (Mesin Fax)	1	
56	Wireless base station + surveillance manpack kit	5	
57	ANTENA ALL BAND	1	
58	Genset	1	
59	Kamera Digital	3	
60	Mainframe (Komputer Jaringan)	4	
61	Peralatan Komputer Jaringan Lain-lain	2	
62	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	
63	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	
64	Jaringan Internet	1	
65	P.C Unit	17	
66	Lap Top	6	

No	Klasifikasi Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
67	Note Book	11	
68	P.C Unit	5	
69	Note Book	22	
70	External/ Portable Hardisk	5	
71	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	
72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	33	
73	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	
74	Mainboard Komputer	1	
75	Tabung cat kompresor	1	
76	Tempat Koran	2	
77	Tenda	1	
78	Mesin Kalkulator	5	
79	Mesin Foto Copy	1	
80	Jam Dinding	8	
81	Peralatan Dapur	1	
82	Personal Komputer	1	
83	Kotak Saran	2	
84	Brangkas	1	
85	Proyektor	1	
86	Senter	2	
87	Tang Crimping Cat 6	1	

1.3 Isu Strategis

Berpedoman kepada RPJMD serta memperhatikan peluang dan ancaman Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, maka kami merumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai ujung tombak pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama instansi pemerintah dengan dunia usaha/swastadaerah/nasional/asing;

3. Belum optimalnya penyelenggaraan sistem informasi investasi;
4. Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap penanaman modal dalam rangka kepatuhan melaporkan perkembangan investasi secara berkala;
5. Belum dilakukan sosialisasi Sistem Operasional Prosedur (SOP);
6. Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja.

1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan LKj IP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 (27 Oktober 2020).
11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (27 Oktober 2020).

1.5 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah, Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DPMPTSPK dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Kepulauan Meranti mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tahap II RPJPD Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan strategi yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah :

**“MENJADIKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN NIAGA
YANG MAJU DAN UNGGUL DALAM TATANAN MASYARAKAT
MADANI”**

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Meranti 2016-2021 maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016-2021 meliputi:

1. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dan nilai-nilai luhur kebudayaan melayu dalam rangka mewujudkan masyarakat madani;
2. Mewujudkan kawasan niaga;
3. Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat;
4. Mewujudkan birokrasi pemerintah yang bersih, efektif dan efisien;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah;
6. Meningkatkan infrastruktur dasar dan optimalisasi penataan ruang;
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, ditinjau dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berkontribusi upaya pencapaian visi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti 2016-2021 berada di bawah *misi 2* yaitu : *Mewujudkan kawasan niaga* dan *misi 5* yaitu *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah*, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 4.1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Lokal Unggulan

Sasaran4.1.1 : Meningkatkan Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti

Sasaran4.1.2: Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja

Kontribusi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap misi ke 2 (dua) dan ke 5 (lima), sekaligus sasaran kinerja bagi DPMPTSPTK berkaitan dengan tenaga kerja berkualitas dan investasi.

1. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja berkualitas sama halnya dengan tenaga kerja yang terdidik yaitu tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal.
2. Investasi adalah penyediaan barang atau jasa yang tidak dikonsumsi sekarang tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang dengan mengharapkan imbal balik yang lebih besar dari modal awal yang telah dikeluarkan baik secara perorangan ataupun kelompok usaha / korporasi yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah diperhitungkan secara matang.

Pemantapan fungsi dan peran dalam meningkatkan nilai investasi dan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas harus melalui upaya-upaya yang lebih cerdas dan terarah serta terukur. Peningkatan nilai investasi dan kualitas tenaga kerja ditunjang dengan adanya potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta semangat kebersamaan dan tanggung jawab dari seluruh aparatur DPMPTSPTK. Sehingga tujuan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPTK dalam mendukung nilai investasi Kabupaten Kepulauan Meranti dapat

terrealisasi dengan maksimal. Adapun tujuan dan sasaran DPMPTSPTK sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSPTK

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Akhir Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Lokal Unggulan	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti	Nilai Investasi	Rp 6M	Rp7.5M	Rp8.5M	Rp 9M	Rp9.5M	Rp 10M	
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	-	-	-	70.01	70.82	

Tujuan dan sasaran ini merupakan turunan yang integral dari misi Bupati Kepulauan Meranti, pada misi 2 yaitu : *Mewujudkan kawasan niaga* dan misi 5 yaitu *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah*.

2.2 Indikator Kinerja Utama DPMPTSPTK

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti mengampun urusan investasi dan tenaga kerja. Berdasar urusan dan

program yang diampu, indikator kinerja utama DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 adalah:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama DPMPTSPTK Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Lokal Unggulan	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti	Nilai Investasi	Rp9.5M
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70.01

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti berisikan penugasan dari Bupati Kepulauan Meranti untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, kinerja DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mewujudkan Visi, Misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja DPMPTSPK Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020
1	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti	Nilai Investasi	Rp. 9.5 Milyar
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Kerja	70.01%

Sumber Data : Renstra DPMPTSPK Kab. Kepulauan Meranti 2016-2021

Untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan, berdasarkan perubahan Renja Tahun 2020 program dan kegiatan beserta pagudana yang digunakan antara lain:

Tabel 2. 4 Program dan Alokasi Dana DPMPTSPK Tahun 2020

NO	URAIAN	PAGU DANA
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,148,471,503.00
1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	626,064,550.00
2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	820,800,000.00
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	701,606,953.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatus	148,000,000.00
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Rumah Jabatan/ Gedung Kantor	148,000,000.00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,000,000.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	100,000,000.00
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	30,000,000.00
1	Publikasi Perizinan dan Non Perizinan Melalui Media Elektronik	30,000,000.00
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	200,000,000.00
1	Publikasi dan Promosi Daerah	200,000,000.00
6	Program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan	43,200,000.00
1	Kinerja Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan	43,200,000.00

NO	URAIAN		PAGU DANA
7	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Periznan		63,900,000.00
	1	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	63,900,00.00


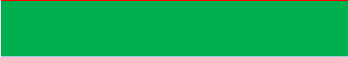

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Kepulauan Meranti yang wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. LKj IP tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.






Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kode Warna Persentase Capaian Target Kinerja Instansi Pemerintah

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Kode warna realisasi capaian kinerja di bawah 100%

No.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (*Out Put*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Oleh sebab itu setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menetapkan Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijadikan sebagai tolok ukur capaian kinerja.

Capaian kinerja DPMPTSPK Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020 didapatkan melalui pengukuran terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dari hasil pengukuran kinerja selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator kinerja DPMPTSPK Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya capaian kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja tersebut dikelompokkan dalam skala nilai peringkat capaian kinerja, dengan mengadopsi peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Capaian kinerja DPMPSTPK Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 sebagaimana yang telah dijanjikan pada Perjanjian Kinerja disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3 Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Investasi	Rupiah	9.5M	9.86	103.79 %
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	70.01	n/a	-

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Sasaran sebagai berikut :

- Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Nilai Investasi dengan capaian kinerja 9.86 Milyar dan pada indikator nilai investasi dengan capaian kinerja 103.79%.
- Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja belum memiliki capain kinerja hal ini dikarenakan belum di *release* nya data investasi di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Tidak terdapat indikator yang tidak memiliki capaian kinerja yang mencapai target 100%.

3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 - 2021 sebanyak 2 (dua) sasaran.

3.3.1 Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti

Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya iklim investasi yang baik yang ditunjang oleh produktivitas yang tinggi. Dengan adanya investasi berarti akan menambah kapasitas input dalam proses produksi hingga pada akhirnya akan menambah output dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya investasi maka setiap pemerintah dituntut untuk memiliki daya saing investasi yang tinggi. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain :

1. Faktor Sumber Daya Alam,
2. Faktor Sumber Daya Manusia,
3. Faktor stabilitas politik perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha,
4. Faktor kebijakan pemerintah,
5. Faktor kemudahan dalam perizinan

Indikator untuk mengetahui seberapa besar meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti ditandai dengan Nilai Investasi yang terdaftar di Kabupaten Kepulauan Meranti yang diukur dengan :

Nilai Investasi

= Jumlah investai yang dilaporkan oleh investor melalui aplikasi BKPM

Capaian meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan Tahun akhir Renstra yaitu dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3. 4 Analisis Pencapaian Meningkatnya Nilai Investasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021	
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	%
1	Nilai Investasi	Rupiah	9.0 M	19.14 M	212.67	9.5 M	9.86 M	103.79	10 M	98.60
Rata – Rata Capaian Kinerja			9.0 M	19.14 M	212.67	9.5 M	9.86 M	103.79	10 M	98.60

Nilai investasi tahun 2020 terealisasi sebesar 9.86 milyar rupiah. Indikator ini melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun 2020 dengan menargetkan sebesar 9.5 milyar rupiah. Capaian kinerja indikator ini sebesar 103.79%, Hal ini juga menunjukkan bahwa melebihi 100%. Dapat disimpulkan bahwa indikator nilai investasi mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) tahun 2019, target indikator sasaran sebesar Rp 9.0 M dengan realisasi sebesar Rp 19.14 M atau sebesar 212.67%. Sehingga jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020 telah terjadi penurunan kinerja. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra DPMPSTPTK periode 2016-2021, maka capaian nya sebesar 98.60%. Dengan capaian tersebut belum melebihi target akhir Renstra periode 2016 – 2021 sehingga dapat dikatakan pencapaian kinerja untuk indikator sasaran ini belum memuaskan. Hal ini harus harus ditingkatkan lagi sehingga dapat mencapai target akhir Renstra dan dapat terus meningkatnya investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Realisasi kinerja dapat dikatakan berhasil perlu dilakukan perbandingan dengan realisasi kinerja lainnya yang sejenis. Pada tahun 2020 belum dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja indikator nilai investasi se Provinsi Riau serta membandingkan realisasi nilai investasi nasional yang tercatat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini dikarenakan belum ditemukan data pembanding baik yang di *release* oleh Provinsi Riau maupun Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Untuk mencapai target kinerja yang dijanjikan, dicapai melalui 2 (dua) program dan kegiatan yakni :

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - Publikasi Perizinan dan Non Perizinan Melalui Media
- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - Publikasi dan Promosi Daerah
- Program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan
 - Kinerja Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan
- Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Output Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja nilai investasi yaitu dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3. 5 Program dan Kegiatan Yang Menunjang Sasaran 1

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/Kurang
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Publikasi Perizinan dan Non Perizinan Melalui Media	30,000,000	30,000,000	Jumlah Jenis Publikasi Yang Disediakan	Menunjang
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Publikasi dan Promosi Daerah	200,000,000	199,770,000	Jumlah Jenis Publikasi dan Promosi Daerah Yang Disediakan	Menunjang

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/Kurang
3	Program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan	Kinerja Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan	43,200,000	43,200,000	Jumlah Panitia Teknis PTSP	Menunjang
4	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	63,900,000	62,700,000	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Yang Disusun	Menunjang

Sumber Data : Data DPMPSTPK Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2020

Capaian program dan kegiatan sasaran 1 dapat diperoleh dengan membandingkan target dan realisasi anggaran serta outputnya. Berikut disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 6 Capaian Program dan Kegiatan Sasaran 1

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Output		Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
			Target	Realisasi			
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	9.74%	9.74%	30,000,000	30,350,000	100.00%
	Publikasi Perizinan dan Non Perizinan Melalui Media	Jumlah Jenis Publikasi Yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	30,000,000	30,000,000	100.00%
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	3.36%	3.35%	200,000,000	199,770,000	99.89%
	Publikasi dan promosi daerah	Jumlah Jenis Publikasi dan Promosi Daerah Yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	200,000,000	199,770,000	99.89%
3	Program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan	5.31%	5,31%	30,584,000	29,484,000	100.00%
	Kinerja Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Panitia Tim Teknis PTSP	32 Orang	32 Orang	43,200,00	43,200,00	100.00%

No	Program dan Kegiatan	Output			Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
		Indikator	Target	Realisasi			
4	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	8.56%	8.40%	63,900,000	62,700,000	98,12%
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Yang Disusun	1 Dok	1 Dok	63,900,000	62,700,000	98,12%

Sumber Data : Data DPMPTSPK Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2020

Tabel di atas menjelaskan tentang output dari program dan kegiatan Tahun 2020 untuk sasaran Nilai Investasi. Dapat dilihat bahwa rata-rata output program dan kegiatan sebesar 99.50%. Sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sangat menunjang pencapaian realisasi sasaran Nilai Investasi.

Untuk mengetahui suatu kinerja memiliki peningkatan capaian kinerja atau tidak, dapat dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Tabel berikut ini akan menyajikan capaian kinerja tahun 2019 dan tahun 2020 dengan melihat program/kegiatan pada kedua tahun tersebut.

Tabel 3. 7 Capaian Kegiatan Tahun 2019-2020 Untuk Sasaran 1

No	Program/Kegiatan	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						
	Publikasi Perizinan dan Non Perizinan Melalui Media Elektronik	4 Jenis	1 Jenis	25%	2 Jenis	2 Jenis	100%
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						
	Publikasi dan Promosi Daerah	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100%
3	Program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan						
	Kinerja Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan	41 Orang	41 Orang	100%	32 Orang	32 Orang	100%
4	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan						

No	Program/Kegiatan	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%

Sumber Data : Data DPMPSTPTK Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2020

Perbandingan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2019 – 2020 menurut kegiatan untuk sasaran Nilai Investasi dapat dilihat pada Tabel di atas. Tabel di atas menjelaskan bahwa terjadi peningkatan dan tetap capaian realisasi fisik kegiatan pada kegiatan yang sama. Terdapat satu kegiatan yang mengalami peningkatan capaian realisasi fisik kegiatan dari tahun 2019 dan 2020 dan satu kegiatan memiliki capaian yang tetap yaitu 100%. Sedangkan, dua kegiatan yang baru pada Tahun 2020 dan sebelumnya belum ada pada Tahun 2019 sehingga belum bisa dibandingkan capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan realisasi penggunaan anggaran terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Analisis Pencapaian Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Nilai Investai	Rupiah	9.5 M	9.86 M	103.79	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	30,000,000	30,000,000	100.00
						Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	200,000,000	199,770,000	99.89
						Program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan	43,200,000	43,200,000	100.00

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
						Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	63,900,000	62,700,000	98.12
Rata-Rata Capaian Kinerja					103.79	Rata-Rata Kinerja Keuangan			99.50
Tingkat Efisiensi									4.29
Tingkat Efektifitas									104.31

Sumber Data : Olahan Data DPMPSTPTK Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan penilaian rata-rata capaian indikator dalam menunjang sasaran pertama adalah 103.79%, yaitu kriteria penilaian realisasi kinerja yang tergolong kategori sangat baik. Artinya pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Tingkat efisiensi 4.29%, menunjukkan selisih persentase realisasi kinerja capaian sasaran meningkatnya investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti melebihi persentase dari realisasi anggaran. Selaras dengan tingkat efektifitas 104.31%, menunjukkan persentase capaian kinerja lebih besar jika dibandingkan persentase realisasi anggaran program kegiatan.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti disebabkan faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut :

❖ **Faktor Pendukung**

1. Berada di kawasan kerjasama segitiga emas (*Golden Triangle*) IMS-GT dan IMT-GT merupakan peluang dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah;
2. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang strategis berada di alur internasional selat Malaka;

3. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan *hinterland* kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan dan Karimun (TBK).
4. Pelayanan Perizinan *Online*

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengembangkan sistem pelayanan perizinan *online* yakni SEMPOLET dan *Online Single Submission* (OSS). Penerapan pelayanan *online* merupakan upaya untuk memberikan kemudahan dalam perizinan sehingga investor tidak perlu datang langsung ke DPMTSPTK untuk melakukan pengurusan izin. Sistem tersebut merupakan upaya pengelolaan sumber daya yang ada agar pelayanan kepada warga bisa maksimal dengan tujuan menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya dan potensi kota digunakan lebih efektif dan efisien. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mewujudkan Meranti Bandar Niaga merupakan langkah strategis guna mengurai permasalahan di Meranti hari ini dan masa yang akan datang.

Pelayanan perizinan yang mudah di dukung dengan layanan Perizinan dan Non Perizinan yang nyaman dan dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan dan non perizinan, seperti:

1. Tersedianya layanan pengaduan perizinan dan non perizinan yang siap menanggapi keluhan dari pelaku usaha.
2. Tersedianya kelengkapan fasilitas yang melayani perizinan *online* yaitu OSS (Online Single Submission) dan Sempolet (Sistem Informasi Perizinan Online Terpadu).
3. Tersedianya SDM yang kompeten yang membidangi perizinan dan non perizinan.
4. Tersedianya ruangan pelayanan yang nyaman dan aman.



Gambar 3. 1 Ruang Pelayanan di DPMPSTPK Kabupaten Kepulauan Meranti

❖ Faktor Penghambat

1. Koordinasi dan kerjasama instansi pemerintah dengan dunia usaha/swastadaerah/nasional/asing yang belum maksimal;
2. Infrastruktur di daerah - daerah potensi investasi yang belum memadai.
3. Ketidakpastian atas lahan hutan yang berkaitan dengan RTRW Provinsi.

4. Kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mengatur perizinan dan non perizinan yaitu belum adanya Peraturan Daerah tentang Perizinan.
5. Pemangku usaha yang masih enggan dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal serta belum mendaftarkan perusahaannya dengan migrasi dari OSS versi 1.0 ke versi 1.1; sehingga menyebabkan capaian kinerja indikator sasaran nilai investasi belum berhasil meningkatkan investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun sudah lebih memenuhi target realisasi dari yang ditetapkan pada awal Tahun 2020. Hal ini dikarenakan, realisasi investasi pada tahun 2020 yaitu realisasi investasi pada Triwulan III karena pada Triwulan IV tidak ada penambahan jumlah konstruksi maupun produksi dari investor. Hal ini karena perubahan perekonomian baik dari sector regional maupun nasional yang dikarenakan Covid 19. Selain itu investor juga harus mendaftarkan kembali perusahaan mereka ke sistem SOS versi 1.1 karena NIB (Nomor Induk Berusaha) mereka tidak ditemukan pada SOS versi 1.1 karena mereka hanya terdaftar pada SOS versi 1.0 sehingga investor dituntut untuk melakukan migrasi dari SOS versi 1.0 ke versi 1.1. Pada SOS versi 1.0 mereka dapat menginput setiap penambahan konstruksi dan produksi Perusahaan mereka sehingga dilaporkan pada LKPM.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengawasan, monitoring dan evaluasi kinerja dengan jalan memonitor proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan penanaman modal yaitu dengan membentuk sebuah tim yang dapat mengawasi izin penanaman modal yang telah diterbitkan. Pembinaan dapat dilakukan dengan melakukan

pendekatan persuasive kepada para pengusaha agar mereka melaporkan laporan per Triwulan perusahaannya ke BKPM serta melakukan pendaftaran ulang dengan memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) yang harus migrasi dari versi 1.0 ke versi 1.1. Selain itu pembinaan juga bisa dilakukan dengan mengoptimalkan klinik BKPM yang terdapat di DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur yang sesuai dengan bidang tugasnya baik kualitas dan kuantitas agar professional, tanggap, cepat, dan bersemangat dengan jalan mengadakan pembekalan dan pelatihan serta magang di instansi terkait dengan bidangnya.
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait proses perizinan secara *online* serta melakukan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintahan untuk meningkatkan proses perizinan yang prima dan terintegrasi.

3.3.2 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan proporsi angkatan kerja terhadap populasi usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari individu yang saat ini sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan. Sementara itu, definisi populasi usia kerja mencakup individu yang berusia antara 16 dan 64 tahun. Statistik ini berguna untuk menganalisis pasar tenaga kerja, terutama ketika anda menyandingkannya dengan tingkat pengangguran. Ketika ekonomi tumbuh dengan kuat, tingkat partisipasi meningkat karena prospek lapangan kerja dan upah membaik.

Tingkat partisipasi kerja yang tinggi berarti banyak orang yang bekerja, atau paling tidak, rajin mencari pekerjaan. Itu kemungkinan terjadi

selama ekonomi makmur. Lapangan kerja melimpah karena bisnis meminta lebih banyak tenaga kerja untuk meningkatkan produksi.

Indikator untuk mengetahui seberapa besar meningkatnya partisipasi angkatan kerja dapat dilihat dari persentase tingkat partisipasi angkatan kerja dengan perumusan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat partisipasi angkatan kerja} = \frac{\text{angkatan kerja}}{\text{penduduk usia kerja}} \times 100\%$$

Capaian meningkatnya partisipasi angkatan kerja dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan Tahun akhir Renstra yaitu dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3. 9 Analisis Pencapaian Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021	
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	%
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	-	67.65	-	70.01	67.65	96.63	70.82	95.52
Rata – Rata Capaian Kinerja			-	67.65	-	70.01	67.65	96.63	70.82	95.52

Sumber Data :Data Badan Pusat Statistik Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2020

Tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan hanya terealisasi sebesar 67.25% dari yang ditargetkan 70.01% sehingga capaian realisasinya sebesar 96.63%. Data tersebut merupakan data yang diolah oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk mengukur capaian kinerja menggunakan data tersebut karena Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Meranti belum *merelease* data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020 berdasarkan sumbernya dari buku **Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2021**.

Realisasi tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2020 bila dibandingkan dengan Tahun 2019 tidak mengalami peningkatan. Capaian

realisasi Tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2019 karena Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tidak menetapkan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Capaian realisasi Tahun 2020 bila dibandingkan dengan target akhir Renstra yang memiliki target sebesar 70.82% yaitu sebesar 95.52%. Hal ini juga belum mencapai target akhir Renstra. Sehingga perlu dilakukan peningkatan kinerja lagi sehingga ditahun berikutnya bisa mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja dapat dikatakan berhasil perlu dilakukan perbandingan dengan realisasi kinerja lainnya yang sejenis. Pada tahun 2020 belum dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja indikator tingkat partisipasi angkatan kerja serta membandingkan realisasi tingkat partisipasi angkatan kerja nasional yang tercatat pada Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan belum ditemukan data pembandingnya.

Untuk mencapai target kinerja yang dijanjikan, dicapai melalui program dan kegiatan. Namun untuk indikator ini belum adanya program yang mendukung indikator ini pada Tahun 2020 walaupun awalnya terdapat 1 (satu) program dan kegiatan yang mendukung. Refocusing anggaran program dan kegiatan tersebut dikarenakan adanya SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 mengakibatkan anggaran ini dialihkan ke kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19

Perbandingan peningkatan realisasi kinerja tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kepulauan Meranti dengan peningkatan realisasi kinerja tingkat pengangguran terbuka Kementerian Ketenagakerjaan belum bisa dilakukan perbandingan. Sehingga belum bisa disajikan kedalam bentuk Tabel seperti Lkj IP Tahun 2020 yaitu seperti Tabel sebagai berikut:

Tabel3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPSTPK Kab. Kepulauan Meranti dengan Kementerian Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	DPMPSTPK		%	Kementerian Ketenagakerjaan		%
			2019	2020		2019	2020	
			1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		Persentase	67.65	

Tabel di atas belum bisa menunjukkan perbandingan peningkatan realisasi kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dengan peningkatan realisasi kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Karena belum ditemukan baik data tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Kepulauan Meranti maupun tingkat partisipasi angkatan kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya partisipasi angkatan kerja dengan realisasi penggunaan anggaran terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

No	Indikator	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	70.01	67.65	96.63	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	-	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja					96.63	Rata-Rata Kinerja Keuangan			-
Tingkat Efisiensi									-
Tingkat Efektifitas									-

Sumber Data : Olahan Data DPMPSTPK Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2020

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran meningkatnya partisipasi angkatan kerja tidak dapat dihitung. Hal ini dikarenakan tidak adanya program kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

Selama Tahun 2020 untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja hanya dilakukan dengan menyediakan pelayanan prima bagi masyarakat yang mencari kelengkapan atau surat keterangan bagi pencari kerja yang merupakan syarat untuk mencari pekerjaan, pembebasan biaya dalam membuat surat keterangan pencari kerja (kartu kuning), sistem yang cepat, tepat dan akurat serta pelayanan prima yang dilakukan oleh pihak DPMPTSPTK.

Tingkat partisipasi angkatan kerja berguna untuk memproyeksi angkatan kerja, sebuah indikator pasokan tenaga kerja di dalam sebuah perekonomian. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi berarti lebih banyak pasokan tenaga kerja dalam perekonomian. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi berarti lebih banyak pasokan tenaga kerja dalam perekonomian. Dengan pasokan tenaga kerja yang lebih banyak, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak output.

Selain itu, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja juga merencanakan program dan kegiatan tentang pelatihan dan kompetensi tenaga kerja yang juga merupakan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan sebagai perantara informasi pelatihan kerja kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perusahaan maupun kelompok-kelompok tertentu. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tidak memberikan pelatihan kinerja di Tahun 2020.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

❖ Faktor Pendukung

1. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan *hinterland* kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan dan Karimun (TBK);
2. Tersedianya Angkatan Kerja.

❖ Faktor Penghambat

1. Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
2. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan kerja;
3. Peluang dan kesempatan kerja yang terbatas.
4. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana SDM pada bidang Tenaga Kerja khususnya UPT-LK yang mengakibatkan tidak berfungsinya UPT-LK secara maksimal.
5. Belum adanya tenaga profesional sebagai pelatih tetap di DPMPTSPTK untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kerja bagi pencari kerja.
6. Belum adanya program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja di DPMPTSPTK di Kabupaten Kepulauan Meranti. Program ini merupakan salah satu program yang terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja , berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung supaya UPT-LK dapat berfungsi secara maksimal.
2. Meningkatkan kinerja dan kedisiplinan ASN melalui pelatihan, pengawasan, pemberian reward dan punishment di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3. Menyediakan instruktur yang berkompeten agar dapat memberikan pelatihan tenaga kerja di UPT-LK.

Selain program dan kegiatan yang mendukung sasaran dan indikator kinerja utama juga terdapat kegiatan lainnya. Output program dan kegiatan di umum sekretariat yang menunjang terlaksananya tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Lokal Unggulan dapat dilihat pada tabel berikut :

Output Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja nilai investasi yaitu dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3. 12 Program, Kegiatan di Umum Sekretariat

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang/Kurangnya
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	626,064,550	626,000,000	Jumlah Perjalanan Dinas yang di bayarkan	Menunjang
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	820,800,000	752,400,000	Jumlah Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Yang Dibayarkan	Menunjang
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	701,606,953	697,301,855	Jumlah Jenis Barang dan Jasa yang Disediakan	Menunjang
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas/ Rumah Jabatan/ Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas/ Rumah Jabatan/ Gedung Kantor	148,000,000	147,758,000	Jumlah Rumah Dinas/Rumah Jabatan/Gedung kantor yang direhab	Menunjang
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	100,000,000	100,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD yang disusun	Menunjang

Capaian program dan kegiatan di umum sekretariat dapat diperoleh dengan membandingkan target dan realisasi anggaran serta outputnya. Berikut disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3. 13 Capaian Program dan Kegiatan di Umum Sekretariat

No	Program dan Kegiatan	Output			Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
		Indikator	Target	Realisasi			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	71.59 %	69.16%	2,148,471,503	2,075,701,855	100.00 %
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas yang di bayarkan	12 Bulan	12 Bulan	626,064,550	626,000,000	100.00 %
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Yang Dibayarkan	57 Orang	57 Orang	820,800,000	752,400,000	100.00 %
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah Jenis Barang dan Jasa yang Disediakan	25 Jenis	25 Jenis	701,606,953	697,301,855	100.00 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur daerah	1.09%	1.09%	148,000,000	147,758,000	100.00 %
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas/ Rumah Jabatan/ Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas/ Rumah Jabatan/ Gedung Kantor	Jumlah Rumah Dinas/Rumah Jabatan/Gedung kantor yang direhab	1 Gedung	1 Gedung	148,000,000	147,758,000	100.00 %
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.00 %	100.00%	100,000,000	100,000,000	100.00 %
	Penyusunan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD yang disusun	3 Dok	3 Dok	100,000,000	100,000,000	100.00 %

Tabel 3.13 menjelaskan tentang capaian program dan kegiatan di Umum Sekretariat Tahun 2020. Dapat dilihat bahwa rata-rata capaian program dan kegiatan sebesar 100.00%. Sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sangat menunjang pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Untuk mengetahui suatu kinerja memiliki peningkatan capaian kinerja atau tidak, dapat dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Tabel berikut ini akan menyajikan capaian kinerja tahun 2019 dan tahun 2020 dengan melihat program/kegiatan pada kedua tahun tersebut.

Tabel 3. 14 Capaian Kegiatan Tahun 2019-2020 Kegiatan di Umum Sekretariat

No	Program/Kegiatan	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	57 Orang	57 Orang	100%	57 Orang	57 Orang	100%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	-	-	-	25 Jenis	25 Jenis	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas/ Rumah Jabatan/ Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas/ Rumah Jabatan/ Gedung Kantor	-	-	-	1 Gedung	1 Gedung	100%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
	Penyusunan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	-	-	-	3 Dok	3 Dok	100%

Sumber Data : Data DPMPSTPK Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2020

Perbandingan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2019 – 2020 menurut kegiatan di Umum Sekretariat dapat dilihat pada Tabel di atas. Tabel 3.14 menjelaskan bahwa terjadi penetapan capaian realisasi fisik kegiatan pada kegiatan yang samadari tahun 2019 dan 2020. Tiga kegiatan yang baru pada Tahun 2020 dan sebelumnya belum ada pada Tahun 2019 sehingga belum bisa dibandingkan capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 3 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanamam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 2,733,571,503.00sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 2,660,329,855.00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97.32%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 kondisi anggaran Silpa Rp 73,241,648.00. Secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 15 Akuntabilitas Keuangan DPMPSTPK Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	APBD Murni	DPA	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
A	Belanja Tidak Langsung	4.211.038.040	3.456.828.789	3.161.912.754	91,47%	294.916.035
1	Gaji dan Tunjangan	2.630.914.040	2.243.778.789	2.094.412.754	93,34%	149.366.035
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.580.124.000	1.213.050.000	1.067.500.000	88,00%	145.550.000
B	Belanja Langsung	3.454.297.653	2.733.011.503	2.660.329.855	97,34%	72.681.648

No	Nama Kegiatan	APBD Murni	DPA	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.224.137.653	2.148.471.503	2.075.701.855	96,61%	72.769.648
1.1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	656.590.000	626.064.550	626.000.000	99,99%	64.550
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	820.800.000	820.800.000	752.400.000	91,67%	68.400.000
1.3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	746.747.653	701.606.953	697.301.855	99,39%	4.305.098
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	150.000.000	148.000.000	147.758.000	99,84%	242.000
2.1	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas/ Rumah Jabatan/ Gedung Kantor	150.000.000	148.000.000	147.758.000	99,84%	242.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23.800.000	0	0	0	0
3.1	Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Aparatur	23.800.000	0	0	0	0
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00%	0
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00%	0
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	31.050.000	30.000.000	30.000.000	100,00%	0
5.1	Publikasi perizinan dan non perizinan melalui media elektronik	31.050.000	30.000.000	30.000.000	100,00%	0
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	537.450.000	200.000.000	199.770.000	99,89%	0
6.1	Penyelenggaraan pameran investasi dan partisipasi pada trade expo	337.450.000	0	0	0	0
6.2	Publikasi dan promosi daerah	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100,00%	0
7	Program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan	91.680.000	43.200.000	43.200.000	100,00%	0
7.1	Kinerja Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan	91.680.000	43.200.000	43.200.000	100,00%	0
8	Program Penertiban, Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan.	31.500.000	0	0	0	0
8.1	Survey Kepuasan Masyarakat	17.300.000	0	0	0	0
8.2	Kinerja layanan Pengaduan, Pelaporan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	14.200.000	0	0	0	0
9	Program Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal	40.000.000	0	0	0	0
9.1	Pembinaan dan Pelayanan permasalahan Penanaman Modal	40.000.000	0	0	0	0
10	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	110.700.000				
10.2	Pelayanan Perizinan Keliling	35.700.000	0	0	0	0
10.1	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	75.000.000	63.900.000	63.900.000	100,00%	0
Jumlah		7.665.335.693	6.189.840.292	5.822.242.609	94,40%	367.597.683

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 16 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Tujuan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Lokal Unggulan	2,733,571,503	2,660,329,855	97,32%
	Jumlah	2,733,571,503	2,660,329,855	97,32%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh dicapai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2020.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel3.17 Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Tujuan DPMPSTPK Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp)	Persentase (%)
A.	Tujuan 1	1		2,660,329,855	97.32%
1.	Melebihi / Melampaui Target	1	50.00%		
2.	Sesuai Target	0	0		
3.	Tidak Mencapai Target	0	0		

Pencapaian Tujuan pada Tahun 2020 merupakan pencapaian kinerja tahun kedua Renstra 2016-2021, dengan demikian diuraikan pula capaian tujuan berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

Tabel 3. 18 Penyerapan Anggaran Pada Setiap Tujuan DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti 2020

No.	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Realisasi Anggaran tahun ke-2	% (dari Pagu Indikatif)
1.	Tujuan 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Lokal Unggulan	2,733,571,503	2,660,329,855	97,32%

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian TujuanDinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja tujuan organisasi.

BAB

PENUTUP

IV

Laporan kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020. Penyusunan LKj IP ini merupakan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sesuai harapan semua pihak.

LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 ini menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, kinerja anggaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020. Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada DPMPSTPK Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran
 - Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator. Indikator 1 sasaran 1 ini realisasinya mencapai target bahkan melebihi target dan memiliki predikat capaian sangat baik.

- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator. Indikator 1 sasaran 2 ini realisasinya tidak dapat dihitung, karena menunggu data yang di realease oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Realisasi dan Capaian Keuangan

Pada perubahan anggaran DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020, dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional kantor sebesar sebesar **Rp 2,565,824,403.00** dengan realisasi anggaran mencapai **Rp 2,122,445,451.00** atau serapan dana APBD mencapai 82.72%, dengandemikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran DPMPTSPTK Tahun 2020) sebesar Rp. 443,378,952.00. Anggaran tersebut terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3,456,828,789.00 dengan realisasi sebesar Rp. 3,161,912,754.00 (91.47%)
2. Belanja langsung sebesar Rp. 2,733,011,503.00 dengan realisasi sebesar Rp. 2,733,011,503.00 (97.34%)

Secara efektif anggaran tersebut telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang tujuan dan sasaran DPMTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkontribusi terhadap misi ke 2 (dua) dan ke 5 (lima) Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan persandingan antara persentase pencapaian kinerja dan persentase realiasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran di DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 sudah cukup efisien. Kemudian dengan mencermati seluruh analisis yang ada, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup optimal. Selanjutnya capaian yang sudah baik tersebut perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

Sebagai penutup, LKjIP DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.

Selatpanjang, 22 Januari 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan Meranti,



AFRIZAL DHARMA, SE
Pembina (IV.a)
NIP. 19740401 199903 1 009

DATA EVIDEN (1)

INDIKATOR NILAI INVESTASI

FORMULASI PERHITUNGAN

*Nilai investasi = Jumlah investasi yang dilaporkan
oleh investor melalui aplikasi BKPM
= Rp. 9.858.195,00*

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI REALISASI INVESTASI 2020

OPD : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 Bulan /Tahun : Triwulan IV Tahun 2020

No	Indikator	Satuan	TARGET		Realisasi Kinerja (Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan/ Tahunan)	Progres Capaian Kinerja (%)		Uraian Singkat Progres kinerja yang Dicapai pada bulan laporan
			Tahun 2020	Triwulan ke IV		Tahun 2020	Triwulan ke IV	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4 (%)	8= 6/5 (%)	9
1	Nilai Investasi	Rupiah	9.500.000.000,-	9.500.000.000,-	9.858.195.000,-	103.77	103.77	NIB tidak ditemukan -adanya pembaharuan sistem/tambahan syarat di dalam sistem izin OSS, dari versi 1.0 harus migrasi menjadi versi 1.1

MENGETAHUI
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
 TENAGA KERJA
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

AFRIZAL DHARMA, SE
 NIP. 19740401 199903 1 009

SELATPANJANG , 13 Januari 2021
 KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN
 SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

EVI NUTYLA, S.IP
 NIP.19720824 199403 2 001

REALISASI LKPM PERUSAHAAN YANG MEMILIKI IZIN PRINSIP TAHUN 2020

Lampiran 1

NO	NAMA PERUSAHAAN	PENANAM MODAL		REALISASI TAHUN												KETERANGAN		
				2020				2021				2022						
				PMDN (RP)	PMA (USD)	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II		III	IV
1	PT. LILY ANUGRAH	10.000.000.000	-	3.429.200.000	2.194.885.000	-	-											Penambahan modal
2	PT. SAN-SAN HOTEL	1.100.000.000,00	-	-	-	-	-											Tidak ada penambahan
3	PT. HOTEL GRAND MERANTI	8.238.330.000	-	29.330.000	4.100.000.000	-	-											Penambahan modal
4	PT. INDOBARU GRAHA MERANTI	14.578.320.327,00	-	-	4.780.000	-	-											Penambahan modal
5	PT. PERTANIAN SUKSES MERANTI	3.000.000.000	-	-	-	100.000.000	-											
	JUMBLAH			3.458.530.000	6.299.665.000	100.000.000	-											

DATA EVIDEN (2)

INDIKATOR TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\begin{aligned} & \textit{Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja} \\ & = \frac{\textit{Angkatan Kerja}}{\textit{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\% \end{aligned}$$

merantikab.bps.go.id/publication/download.html?nrbyfeve=NTNIZGMxMWizODI4ZTdlMzY2ZTQ5YjNm&bxmzmn=aHR0CHM6Ly9tZXJhbnRpa2FILmJwcy5nb5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDIxLzI2LzUzYmRjMTFIMzgyOGU3ZTM2NmU0OWZlZi9rYWY1...

download.html 38 / 324 137%

participasi angkatan kerja 1/1

Statistik Kunci, 2018–2020 Key Statistics, 2018–2020

Rincian/Description (1)	Satuan/Unit (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk / Population ¹	juta/million	0,184	0,208	0,206
Laju Pertumbuhan Penduduk / Population Growth ¹	%	0,47	...	1,52
A Harapan Hidup ^{1-e} / Life Expectancy Rate ¹	tahun/years
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ^{1,3} Labour Force Participation Rate-LFPR ^{1,3}	%	68,63	67,65	...
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ² Unemployment Rate-UR ²	%	6,84	6,19	...
Penduduk Miskin ³ /Poor People ³	Ribu/Thousand	51,17	49,89	...
Persentase Penduduk Miskin ⁴ Percentage of Poor People ⁴	%	27,79	26,93	...
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁵ Human Development Index ⁵	-	65,23	65,93	65,50
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁴ Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price ⁴	Milyar rupiah Billion rupiahs	18 184,68	18 457,37	...
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁵ /Economic Growth ⁵	%	4,04	2,66	...
PDRB Per Kapita Harga Berlaku ^{4,5} Per Capita of GRDP at Current Price ^{4,5}	juta rupiah million rupiahs	18 184,68	18 457,37	...

Catatan/Notes: ¹ Hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 (pertengahan tahun/Juni)/The result of Indonesia population projection 2010–2035 (mid year/June)
² Kondisi Agustus/Condition at August
³ Menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk tahun 2010–2035/Weighted by the 2010–2035 population projection
⁴ Kondisi Maret/Condition at March
⁵ Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita/Since 2010, HDI was calculated using a new method. New HDI component are life expectancy at birth, expected years of schooling, mean

Keterangan : Badan Pusat Statistik Belum Mengeluarkan Data Tahun 2020

DATA KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	: 67,65 %
2. Tingkat Penduduk Usia Kerja (TPUK)	: 64,40 %
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	: 6,20 %
4. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	: 93,81 %
5. Tingkat Setengah Menganggur (TSM)	: 21,32 %
6. Jumlah Angkatan Kerja (AK)	: 91.136 orang
7. Jumlah Penduduk Usia Kerja	: 131.718 orang
8. Jumlah Pengangguran	: 5.641 orang
9. Jumlah yang Bekerja	: 85.494 orang
10. Jumlah Setengah Menganggur	: 19.430 orang

Selatpanjang, 09 Maret 2021

Kepala Bidang Tenaga Kerja



SARIFUDIN Y.KAI, SH

NIP. 19630323 198703 1 005